

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (1997 – 2006)**

ARAFAT , MOHAMAD SADAM

Pembimbing : Prof .Dr. Djoko Mursinto, SE., M.Ec.

LOCAL FINANCE ; AUTONOMY

KKB KK-2 C 122 / 08 Ara a

Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 menjadi tonggak sejarah pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan lebih memantapkan perekonomian daerahnya dengan sumberdayanya sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam membiayai keuangannya sebelum (periode 1997-2000) dan sesudah pelaksanaan (periode 2001-2006) otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, analisis Tingkat Kemandirian Daerah, dan analisis Elastisitas Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode sebelum otonomi daerah derajat desentralisasi daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 10,07 persen dan tingkat kemandirian daerah sebesar 20,74 persen. Dan di saat periode pelaksanaan otonomi daerah derajat desentralisasi daerah sebesar 6,78 persen dan tingkat kemandirian daerah sebesar 12,85 persen. Kedua hasil tersebut baik di periode sebelum dan sesudah otonomi daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Nganjuk masih rendah dan pola yang berlaku di hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih pola instruktif. Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun jika dilihat dari koefisien elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan baik atas dasar harga berlaku (PDRB HB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB HK), otonomi daerah membawa dampak yang cukup baik karena berhasil mengubah koefisien elastisitas PAD dari inelastis ($e < 1$) di periode sebelum otonomi daerah sebesar 0,30 (PDRB HB) dan -2,51 (PDRB HK) menjadi elastis ($e > 1$) di masa pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebesar 2,28 (PDRB HB) dan 6,44 (PDRB HK).

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemandirian Daerah, Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

ABSTRACT

The implementation of local autonomy era since 2001, has become local government moment to conduct a more self supporting and bigger responsibility to itself. The growth of their people prosperities with their own resources are the goal for local government in local autonomy era.

This research aim to measure the Nganjuk regency ability to support their local financial before local autonomy era (1997-2000 period) and after the implementation of local autonomy (2001-2006 period). Degree of Fiscal Decentralization analysis, Local monetary independence storey analysis, and elasticity of PAD are the measurements.

The result of this research indicate that Nganjuk regency not yet can execute local autonomy. The values were before local autonomy: 10,07 percent degree of fiscal decentralization, 20,74 percent local monetary independence storey. After the local autonomy era: 6,78 percent degree of fiscal decentralization and 12,85 percent local monetary independence storey. Both the values showed that before or after local autonomy the pattern of financial relationship between central government and local government are instructive pattern. But, with the changes of elasticity PAD to Regional Gross Domestic Product (PDRB) coefficient before and after local autonomy, from inelastic ($e < 1$) 0,30 (PDRB HB) and -2,51 (PDRB HK) to elastic ($e > 1$) 2,28 (PDRB HB) and 6,44 (PDRB HK). The local autonomy brings the good development to local economy.

Keywords :Decentralization, Local Autonomy, Degree of Fiscal Decentralization, local monetary independence storey, Elasticity of PAD, Regional Gross Domestic Product (PDRB)